

## Evaluasi Penerapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara

*Evaluation of The Implementation of Government Agency Performance Accountability Reports Based on Presidential Regulation No. 8 of 2006 At The Regional Industry And Trade Service For The Province of North Sulawesi*

**Priscilia F. Winerungan , Harijanto Sabijono , dan Peter Kapojos**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Rulangi Manado, Indonesia

E-mail : [P23winwrungan@gmail.com](mailto:P23winwrungan@gmail.com) , [h\\_sabijono@unsrat.ac.id](mailto:h_sabijono@unsrat.ac.id) , [pmkapojos@gmail.com](mailto:pmkapojos@gmail.com)

**Abstrak:** Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali informasi, memberikan deskripsi dan menganalisis Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan data diperoleh melalui wawancara, kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya beberapa faktor besar yang membentuk akuntabilitas antara lain Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Artinya bahwa di dalam laporan pertanggungjawaban harus mengandung informasi yang jelas dan terbuka, jujur dan objektif. Akuntabilitas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terstruktur dan sudah cukup baik.

**Kata kunci:** Evaluasi, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Disperindag.

**Abstract:** *Accountability is a form of accountability for a person (leader, officer or executor) or an organization to parties who have the right or authority to request information related to performance or actions in carrying out the mission and goals of the organization in the form of reporting that has been determined periodically. The purpose of this study is to gather information, provide a description and analyze the performance accountability of government agencies at the regional industry and trade office of north Sulawesi province. The method used in this study is a qualitative method that is descriptive and obtained through interviews, questionnaires and documentation. The result of this study indicate that there are several major factors that shape accountability including performance measurement, strategic plans, performance management and evaluation. This means that the accountability report must contain information that is clear open, honest and objective. Accountability at the regional office of industry and trade of north Sulawesi province is well structured and good.*

**Keyword :** *Evaluation, Accountability of government agency performance, Disperindag.*

---

### PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, semakin kuat tuntutan pada pelaksanaan akuntabilitas baik dalam pemerintahan pusat juga pemerintahan daerah. Akuntabilitas secara umum dapat diartikan sebagai permintaan pertanggungjawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang diserahkan kepadanya.

Di Indonesia sendiri, pengelolaan keuangan berbasis kinerja mulai diwajibkan dalam pembuatan laporan keuangan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kepala Perwakilan BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara, Karyadi mengatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK-RI Perwakilan Sulawesi Utara ditunjukkan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan kepada Kapuibaten/Kota di Sulawesi Utara , dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan. Anggota VI BPK mengungkapkan bahwa berdasarkan pemeriksaan BPK yang dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), maka BPK-RI menyimpulkan bahwa opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). ([bpk.go.id](http://bpk.go.id)).

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat

untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dari kinerja perusahaan (Herry, 2017).

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru. Hampir seluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan administratif pemerintahan. Beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam penerapan konsep akuntabilitas di Indonesia antara lain adalah; rendahnya standar kesejahteraan pegawai sehingga memicu pegawai untuk melakukan penyimpangan guna mencukupi kebutuhannya dengan melanggar asas akuntabilitas, faktor budaya seperti kebiasaan mendahulukan kepentingan keluarga dan kerabat dibanding pelayanan kepada masyarakat, dan lemahnya sistem hukum yang mengakibatkan kurangnya dukungan terhadap faktor hukum jika sewaktu-waktu terjadi penyimpangan khususnya di bidang keuangan dan administrasi (woroastuti.blogspot.com).

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodic. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendorong Instansi fokus pada Pencapaian Sasaran. Dalam upaya Pencapaian Sasaran perlu sebuah Alat Ukur yang dinamakan Indikator Kinerja. Indikator kinerja berupa : (a) Hasil (*Outcome*) : Bagaimana Tingkat Pencapaian Kinerja yang diharapkan terwujud, berdasarkan *Output* (Keluaran) atas Kebijakan atau Program yang sudah dilaksanakan; (b) Keluaran (*Output*) : Bagaimana produk yang dihasilkan secara langsung oleh adanya Kebijakan atau Program, berdasarkan *Input* (Masukan) yang digunakan.

Evaluasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*resultoriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Pada instansi Pemerintah seperti pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga mengutamakan akuntabilitas kinerja yang baik. Salah satu penunjang terbentuknya akuntabilitas kinerja yang baik yaitu dengan menyediakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga merupakan alat penilaian kinerja, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua instansi pemerintah.

Setiap instansi pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan yang menunjukkan akuntabilitas dan transparansinya. Pengendalian kualitas Laporan Keuangan Pemerintah akan berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka dari itu untuk menghindari penyalahgunaan keuangan maka harus dilakukan laporan pada setiap instansi di setiap tahunnya. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul "Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara".

**Akuntansi.** Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi ini, dan berdasarkan standar yang diakui umum. Oleh karena itu, pihak yang berkepentingan atas perusahaan dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan, sehingga dapat mengambil keputusan maupun pemilihan dari berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi.

**Akuntabilitas.** Menurut UNDP (*United Nations Development Program*), akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Definisi yang sama disebutkan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

**Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.** Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi

organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mewujudkan suatu organisasi yang berakuntabilitas kinerja baik, setiap unit organisasi perlu menerapkan SAKIP.

### **Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Haniah Hanafie, Agus Nugraha dan Masrul Huda (2019) yang berjudul Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep). Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dana desa di kecamatan masalembu, dilihat dari aspek keuangan, manfaat dan prosedur belum dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sayuti, Jamaluddin Majid dan Muhammad Sapril Sardi Juardi (2018) yang berjudul Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money Dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Pada Kantor BAPPEDA Sulawesi Selatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perwujudan nilai transparansi sudah diterapkan dengan adanya keterbukaan informasi dan proses nilai akuntabilitas pertanggungjawaban terhadap publik dan pemerintah sesuai dengan aturan, dalam proses pengelolaan keuangan akuntansi dengan menggunakan sistem yang berbasis akrual, konsep *Value For Money* cukup ekonomis, efisien dan efektif di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rahman Dilapanga (2018) yang berjudul Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow telah dipertanggungjawabkan lewat laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dan telah berhasil melaksanakan 6 (enam) program dan 21 kegiatan baik yang didanai melalui APBD maupun APBN dengan capaian rata-rata 100%.

## **METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali informasi, memberikan deskripsi dan menganalisis Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

### **2.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian mengambil lokasi penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Jl. Tololiu Supit Nomor 25 Tingkulu, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara, dan waktu penelitian direncanakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.

### **2.3 Jenis, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh melalui wawancara ke beberapa pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan pembagian kuesioner yang nantinya akan disebarkan kepada beberapa pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bagian Sekretariat. Sedangkan untuk data sekunder sendiri diambil dari LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan langsung terhadap objek penelitian, dengan tujuan untuk mengumpulkan data informasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara kepada beberapa

pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan pembagian kuesioner kepada pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Bidang Sekretariat yang terdiri dari 15 pertanyaan mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan untuk data sekunder sendiri diperoleh dari LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, Kuesioner dan Dokumentasi.

#### **2.4 Metode dan Proses Analisis Data**

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif, yaitu metode pembahasan yang sifatnya memaparkan dan menjelaskan bagaimana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan membahas permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut :

##### **1. Pengumpulan data.**

Pada proses ini peneliti akan melakukan wawancara dan membagi kuesioner kepada beberapa pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara bidang Sekretariat.

##### **2. Analisis**

Pada proses ini setiap data yang terkumpul akan dianalisis untuk mengetahui bagaimana persepsi pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

##### **3. Penarikan Kesimpulan**

Peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh. Kesimpulan menjadi acuan peneliti untuk pemberian saran sesuai dengan hasil penelitian.

##### **4. Pemberian Saran**

Peneliti akan memberikan saran dari kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### **Pengukuran Kerja**

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi setiap instansi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara termasuk salah satunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yakni (a) data internal dinas dan (b) data eksternal berasal dari luar instansi baik primer maupun sekunder. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja pada setiap instansi di Provinsi Sulawesi Utara salah satunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah baik. Hal ini diungkapkan oleh informan yaitu Bapak Bryan Christo dalam wawancara yang dilakukan pada Senin, 21 Juni 2021. "Penilaian pengukuran kinerja dapat dilihat dari 4 kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Jika realisasi indikator kinerja suatu instansi mencapai 99%, maka pengukuran kinerja dari instansi tersebut dinilai baik karena semua anggaran terserap dan untuk Dinas Perindustrian sendiri sudah dikatakan baik karena telah memenuhi 4 kriteria tersebut".

#### **Rencana Strategis**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, rencana strategis menjadi salah satu hal penting bagi instansi tersebut dikarenakan Rencana Strategis (RENSTRA) dapat membantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mencapai tujuan jangka menengah instansi tersebut. Hal ini diungkapkan oleh informan yaitu

Ibu Merry Mangindaan dalam wawancara yang dilakukan pada Senin, 21 Juni 2021 “Untuk rencana strategis sendiri merupakan salah satu hal penting bagi kami. Itudikarenakan rencana strategis sangat berdampak bagi tujuan jangka panjang instansi. Kami Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sangat memperhatikan hal tersebut.”.

#### **Pelaporan Kinerja**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dalam memberikan laporan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah memenuhi kriteria-kriteria yang harus dicapai dan memenuhi waktu yang ditentukan dalam pelaporan kinerja. Hal ini diungkapkan oleh informan yaitu Bapak Firman Talib dalam wawancara yang dilakukan pada Senin, 21 Juni 2021 “Suatu instansi dikatakan baik dalam memberikan laporan kinerja jika memenuhi kriteria-kriteria yang harus ada dalam laporan kinerja yaitu apakah laporan kinerjanya sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah? Apakah sudah berdasarkan undang-undang yang berlaku? Penilaian dari efektivitas pengendalian internnya. Berdasarkan opini LKPD, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Sudah mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Jika sudah begitu maka laporan kinerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah memenuhi kriteria-kriteria yang harus dicapai dalam setiap laporan kinerjanya”.

#### **Pengelolaan Data Kinerja**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, pengelolaan data kinerja pada instansi tersebut dikatakan sudah dikelola dengan baik. Hal ini diungkapkan oleh informan yaitu Ibu Jermine Sabudu dalam wawancara yang dilakukan pada Senin, 21 Juni 2021 “Pengelolaan Data Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dikelola dengan baik walaupun masih terdapat beberapa kendala, ini dimaksud agar data kinerja dari Disperindag memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas dan tegas karena mengingat setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada BPK dan juga kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

#### **Evaluasi Kinerja**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, selalu rutin melakukan evaluasi pada setiap kinerja pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara guna mengetahui hasil kerja dari setiap pegawai dan juga dari instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini diungkapkan oleh Ibu Enricke Pinontoan pada wawancara Senin, 18 Oktober 2021 “Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sendiri selalu rutin melakukan evaluasi kinerja. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui hasil kerja dari pegawai yang ada dan juga dapat mengetahui pencapaian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan mana kinerja yang harus dipertahankan dan mana yang harus diperbaiki lagi. Dan di instansi ini juga diterapkan kepada semua pegawai harus memiliki kinerja kerja yang optimal dan mampu mencapai target yang telah ditentukan oleh instansi”.

### **Pembahasan**

#### **Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi setiap instansi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara termasuk salah satunya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Pengukuran kinerja merupakan hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja yang diperoleh dari dua sumber yakni (a) data internal dinas dan (b) data eksternal berasal dari luar instansi baik primer maupun sekunder. Berikut contoh pengukuran kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 :

Untuk pencapaian indikator sasaran pada Tahun 2020, terlebih dahulu diinventarisir hasil pelaksanaan kegiatan untuk kemudian dilakukan analisa serta pembobotan terhadap hasil analisisnya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan realisasi kinerja dengan target sasaran kinerja yang dicantumkan dalam dokumen

Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.

2. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun ini dengan tahunlalu,
3. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengantarget sasaran kinerja 5 (lima) tahun yang direncanakan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Analisa pencapaian pelaksanaan kinerja dan pemberian bobot pada hasil analisa kinerja yang telah dilakukan. Pengukuran persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakter komponen realisasi dalam kondisi :

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik,maka digunakan rumus :  

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja,maka digunakan rumus :  

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pemaknaan dari capaian nilai kinerja ini terbagi atas kalifikasi sebagai berikut :

**Tabel 1. Pemaknaan dari capaian nilai kinerja**

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Baik
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah

### Rencana Strategis

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah dokumen yang dijadikan pedoman atau acuan penyusunan dokumen perencanaan lainnya karena memuat visi, misi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dan pengembangan industri dan perdagangan daerah, serta tahapan pelaksanaannya selama lima tahun.

Penyusunan dokumen RENSTRA ini berfungsi sebagai alat koordinasi bagi seluruh *stakeholder* terkait, termasuk dunia usaha dan masyarakat. Disamping itu pula, fungsi Renstra ini juga adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka meningkatkan perannya sebagai organisasi publik yang memberikan pelayanan jasa di sektor Perindustrian dan Perdagangan, yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja pembangunan daerah nyiur melambai.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2017-2021 menggambarkan arahan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian disusun dengan pendekatan perencanaan yang terstruktur, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban suatu instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun berjalan dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Gubernur Sulawesi Utara dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (bpk.go.id). Untuk dikatakan sebagai laporan kinerja yang baik, perlu adanya 4 kriteria penting dalam penyusunan laporan kinerja yaitu Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures); Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; Efektivitas sistem pengendalian intern.

Berikut merupakan contoh perjanjian kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 yang dicantumkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) :

**Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Sulawesi Utara	Prosentase sektor Industri terhadap PDRB Sulawesi Utara	9,15%
2.	Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Sulawesi Utara	Prosentase sektor Perdagangan terhadap PDRB Sulawesi Utara	12,35%

Untuk mewujudkan target kerja yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp. 15.313.465.000. Anggaran tersebut terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 7.313.465.000 dan Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 8.000.000.000. Anggaran belanja langsung tersebut terbagi lagi menjadi Rp. 7.500.000.000 untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Rp. 500.000.000 untuk Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

**Tabel 3. Kinerja Lainnya (APBN Tahun 2020)**

PROGRAM SATKER	ANGGARAN
Bidang Fasilitasi & Pengembangan IKM	1.969.237.000
Bidang Perdagangan Dalam Negeri	644.225.000
Bidang Perdagangan Luar Negeri	290.574.000
<b>Total APBN</b>	<b>2.904.036.000</b>

### Pengelolaan Data Kinerja

Pengelolaan kinerja adalah suatu proses pencatatan, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan Data Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara meliputi 3 (tiga) dimensi kinerja :

#### 1. Kualitas (*Quality*)

Kualitas kinerja adalah suatu hasil yang dapat diukur dengan efektifitas dan efisiensi suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran perusahaan dengan baik dan berdaya guna. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, kualitas kerja dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dikatakan baik, dimana adanya perjanjian kinerja agar dapat menjamin kualitas kinerja dapat berjalan dengan baik dan selalu mendapat pengawasan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

#### 2. Kuantitas (*Quantity*)

Kuantitas kinerja mengarah kepada jumlah kerja yang dicapai oleh pegawai organisasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pencapaian kinerja sektor industri masih sesuai namun ada beberapa permasalahan dan kendala seperti masih rendahnya rantai pasok dengan produk pendukungnya; masih rendahnya modal produk bagi pelaku IKM; rendahnya daya saing produk lokal; terbatasnya pengawasan barang/jasa pada pasar tradisional, toko modern dan pusat perbelanjaan; terbatasnya SDM Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen; dan terbatasnya partisipasi pada kegiatan pameran dalam maupun luar negeri.

#### 3. Waktu Penyelesaian

Suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh setiap pegawai di suatu organisasi mempunyai standar waktu yang berbeda-beda. Visi dan misi dari suatu organisasi sangat berpengaruh dalam hal ketepatan waktu yang telah dilakukan. Begitu banyak instansi yang ada bisa mencapai kesuksesan karena kinerja dari sumber daya manusia. Tetapi, dijumpai juga instansi- instansi atau suatu organisasi yang gagal dikarenakan faktor dari SDM. Berdasarkan penelitian yang ada, pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) di setiap bidang yang ada.

**Evaluasi Kinerja**

1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja

Proses pencapaian indikator selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 capaian kinerja di dapat dari kegiatan bantuan mesin danperalatan bagi wirausaha baru industri kecil menengah.
- Sasaran 2 capaian kinerja di dapat dari kegiatan (1) pengawasan barang beredar dalam pengawasan, (2) peningkatan pengawasan peredaran barangdan jasa, dan (3) pemantauan stok barang kebutuhan pokok dan barang strategis (BAPOKSTRA).

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis dapat dilihat pada Tabel 4.

**Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2020**

SASARAN	URAIAN
Sasaran : 1	Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Sulawesi Utara, diarahkan pada pertumbuhan industry pengelolaan di Sulawesi Utara. Capaian kinerja sektor industry terhadap PDRB Sulawesi Utara sebesar <b>101,39%</b> dengan kategori <b>“Sangat Baik”</b> . Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui program : 1.Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2.Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 3.Program Peningkatan Industri Hilirisasi Komoditi Agro 4.Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
Sasaran : 2	Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Sulawesi Utara, diarahkan pada pertumbuhan Perdagangan di Sulawesi Utara. Capaian kinerja sektor Perdagangan terhadap PDRB Sulawesi Utara sebesar <b>102,86%</b> dengan kategori <b>“Sangat Baik”</b> . Pencapaian tersebut dilaksanakan melalui Program : 1.Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2. Evaluasi Program dan Kegiatan yang menunjang Capaian Kinerja Pencapaian program dan kegiatan yang menunjang capaian kinerja dapat dilihatpada Tabel 5.

**Tabel 5. Program dan Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja**

Sasaran	Indikator Utama (IKU)	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Sulawesi Utara	Presentasesektor Industri terhadap PDRB Sulawesi Utara	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	973.082.500	973.082.500	100%
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinai (RPIP) Sulawesi Utara	18.338.200	18.338.200	100%
		Kegiatan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Sulawesi Utara	5.082.400	5.082.400	100%
		Bantuan Mesin Peralatan Bagi Wirausaha Baru IKM	949.661.900	949.661.900	100%

<p><b>Meningkatnya kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Sulawesi Utara</b></p>	<p><b>Presentasektor Perdagangan terhadap PDRB Sulawesi Utara</b></p>	<p><b>Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri</b></p>	<p><b>15.973.100</b></p>	<p><b>15.973.100</b></p>	<p><b>100%</b></p>
		<p>Pengembangan produk unggulan industri agro</p>	<p>2.467.800</p>	<p>2.467.800</p>	<p>100%</p>
		<p>Peningkatan pencegahan pencemaran industri</p>	<p>13.505.300</p>	<p>13.505.300</p>	<p>100%</p>
		<p><b>Program Peningkatan Industri Hilirisasi Komoditi Agro</b></p>	<p><b>4.769.600</b></p>	<p><b>4.769.600</b></p>	<p><b>100%</b></p>
		<p>Pengujian sampel produk hilir</p>	<p>4.769.600</p>	<p>4.769.600</p>	<p>100%</p>
		<p><b>Program Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus</b></p>	<p><b>55.587.300</b></p>	<p><b>55.587.300</b></p>	<p><b>100%</b></p>
		<p>Penguatan Kelembagaan Sekretariat Dewan Kawasan KEK</p>	<p>2.467.800</p>	<p>2.467.800</p>	<p>100%</p>
		<p>Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pusat dan Daerah</p>	<p>53.646.000</p>	<p>53.646.000</p>	<p>100%</p>
		<p><b>Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri</b></p>	<p><b>10.451.100</b></p>	<p><b>10.451.100</b></p>	<p><b>100%</b></p>
		<p>Pemantauan StokBarang Kebutuhan Pokok dan Barang Strategis (BAPOKSTRA)</p>	<p>10.451.100</p>	<p>10.451/100</p>	<p>100%</p>
		<p><b>Program Perlindungan Konsumen danPengamanan Perdagangan Dalam Negeri</b></p>	<p><b>60.888.200</b></p>	<p><b>58.840.600</b></p>	<p><b>96,64 %</b></p>
		<p>Pengawasan Barang BeredarDalam Pengawasan</p>	<p>6.423.800</p>	<p>6.423.800</p>	<p>100%</p>
		<p>Peningkatan PengawasanPeredaran Barang dan Jasa</p>	<p>53.964.400</p>	<p>51.916.800</p>	<p>96,21%</p>
		<p>Monitoring, Evaluasi, dan Pelaoran</p>	<p>500.000</p>	<p>500.000</p>	<p>100%</p>
		<p><b>Program Pengembangandan Peningkatan Kompetensi SDM Penguji Mutu Barang</b></p>	<p><b>200.000</b></p>	<p><b>200.000</b></p>	<p><b>100%</b></p>
		<p>Magang Kalibrasi Alat Ukur</p>	<p>200.000</p>	<p>200.000</p>	<p>100%</p>
		<p><b>Program Peningkatan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang</b></p>	<p><b>56.945.985</b></p>	<p><b>56.905.585</b></p>	<p><b>99,93%</b></p>
		<p>Pengawasan Mutu Komoditi Ekspor/Komoditi Potensial</p>	<p>42.526.600</p>	<p>42.486.200</p>	<p>99,91%</p>
		<p>Peningkatan Efisiensi dan Uji Banding Laboratorium Pengujian dan Kalibrasian Kapasitas Laboratorium</p>	<p>14.419.385</p>	<p>14.419.385</p>	<p>100%</p>

Permasalahan dan solusi di pelaksanaan urusan Industri a) masih rendahnya rantai pasok dengan produk pendukungnya, b) masih rendahnya modal produksi bagi pelaku IKM, c) rendahnya daya saing produk lokal. Solusi yang diupayakan adalah a) pengembangan kerjasama antara IKM dan indsutri besar dalam rangka penguatan rantai pasok produk dan produk pendukung, b) pengembangan kerjasama dengan lembaga

perbankan, sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses informasi pembiayaan, c) peningkatan daya saing produk lokal melalui desain kemasan.

Permasalahan dan solusi di pelaksanaan urusan Perdagangan a) terbatasnya pengawasan barang/jasa pada pasar-pasar tradisional, toko modern dan di pusat-pusat perbelanjaan serta pertokoan, b) terbatasnya SDM Penyidik Pegawai Sipil Negeri Perlindungan Konsumen, c) terbatasnya partisipasi pada kegiatan pameran dalam dan luar negeri karena pandemic covid-19. Solusi yang diupayakan a) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota bersinergi dalam melaksanakan perlindungan konsumen dan pengawasan terhadap barang yang beredar baik di pasar tradisional maupun di toko modern, b) Penyidik Pegawai Sipil Negeri untuk ditambah jumlahnya, mengingat semakin beragamnya barang yang beredar yang perlu diawasi baik produk dalam negeri maupun produk luar negeri, c) Partisipasi aktif pada kegiatan pameran dalam dan luar negeri yang mengangkat produk Sulawesi Utara.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara dan pembagian kuesioner serta adanya beberapa data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penilaian pengukuran kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah baik karena sudah memenuhi 4 kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
2. Rencana Strategis merupakan hal yang penting bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara karena Rencana Strategis (RENSTRA) dinilai dapat membantu instansi tersebut dalam mencapai tujuan jangka menengah. rencana strategis menjadi salah satu hal penting bagi instansi tersebut dikarenakan anggaran untuk digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi instansi tersebut.
3. Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah memenuhi kriteria-kriteria yang harus dicapai dan memenuhi waktu yang ditentukan dalam pelaporan kinerja. Dan untuk opini Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) masuk dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
4. Pengelolaan Data Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dikatakan baik. Data kinerja pada instansi tersebut juga memiliki mekanisme dan prosedur yang jelas.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara rutin dalam melakukan evaluasi kinerja guna dapat mengetahui hasil kerja dari pegawai yang ada dan juga dapat mengetahui pencapaian dari instansi tersebut. Dan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara selalu menerapkan kepada seluruh pegawai yang ada yaitu harus memiliki kinerja kerja yang optimal dan mampu mencapai target yang telah ditentukan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dilapanga, A. R. 2018. *Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow*. Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan. 2(2) : 50-54.
- Hanafie, H., Nugraha, A., dan Huda, M. 2019. *Akuntabilitas Dana Desa (Kajian Tentang Akuntabilitas Dana Desa Di Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep)*. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah. 4(1) : 39-46.
- Hery. 2017. *Teori Akuntansi: Pendekatan Konsep dan Analisis*. Gramedia Widiasarana. Indonesia
- <http://www.bpkp.go.id/sulut/berita/read/24429/20/Penyerahan-Laporan-Hasil-Pemeriksaan-atas-LKPD-oleh-BPK-RI-Perwakilan-Sulawesi-Utara.bpkp>
- Sayuti, S., Majid, J., dan Juardi, S. S. 2018. *Perwujudan Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik*. ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi. 1(1) : 16-28.